

## **ABSTRACT**

*In the course of Abdurrahman's government there was friction between Abdurrahman and the House of Representatives where the friction was getting stronger and the Buloggate and Brunaigate scandals arose so that the DPR demanded Gus Dur's account that ended two memorandums from the first DPR asking for the answer of Gus Dur and the second urging him The Special Assembly, at that time Gus Dur then issued a Presidential Decree where the first point of the decree was the enforcement of the House of Representatives / People's Consultative Assembly, the second return of the sovereignty of the people's hand, and the third freeing of the Golkar party. When the decree was issued by Abdurrahman automatically Akbar Tanjung as the general chairman of the Golkar party to fight against the decree, Akbar Tanjung made various political communications to oppose the decrees issued by Abdurrahman, and Akbar Tanjung made the problematic that happened then as a vehicle for The Golkar party to survive and exist in the politics of Indonesia. The approach of this research is qualitative with case study method, data collecting by using primary data of interview result and secondary data through documentation and library research. Data management through qualitative analysis. The results of this research are: First Political Communication Akbar Tandjung in solving the problem of the dissolution of Golkar party in Era Gus Dur over the Presidential dektrit. Secondly, Akbar Tandjung's role was able to save the Golkar Party from the threat of Dektrit President and deliver the Golkar Party to the golden age.*

*Keywords: Political Communication, Golkar Party, Akbar Tandjung*

UNIVERSITAS  
MERCU BUANA

## ABSTRAK

Dalam perjalanan pemerintahan Gus Dur terjadi gesekan antara Gus Dur dan DPR dimana gesekan tersebut semakin hari semakin kuat ditambah munculnya skandal Buloggate dan Brunaigate sehingga DPR meminta pertanggung jawaban Gus Dur yang berakhir keluarnya dua memorandum dari DPR yang pertama meminta pertanggung jawaban Gus Dur dan kedua mendesak dilakukannya Sidang Istimewa, pada saat itulah Gus Dur kemudian mengeluarkan Dekrit Presiden dimana point pertama dekrit tersebut adalah pembekuan DPR/MPR, kedua pengembalian kedaulatan ketangan rakyat, dan ketiga pembekuan partai golkar. Ketika dekrit tersebut dikeluarkan oleh Gus Dur secara otomatis Akbar Tanjung sebagai ketua umum partai golkar melakukan perlawanan atas dekrit tersebut, Akbar Tanjung melakukan berbagai komunikasi politik untuk menentang dekrit yang dikeluarkan oleh Gus Dur tersebut, dan Akbar Tanjung menjadikan problematika yang terjadi saat itu sebagai wahana bagi partai Golkar untuk tetap survive dan eksis dikancah politik Indonesia. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan metode studi kasus, pengumpulan data dengan menggunakan data primer hasil wawancara dan data sekunder melalui bedah dokumentasi dan kepustakaan. Pengelolaan data melalui analisis kualitatif. Hasil penelitian ini adalah: Pertama Komunikasi Politik Akbar Tandjung dalam menyelesaikan masalah pembubaran partai Golkar yang di Era Gus Dur atas dekrit Presiden. Kedua, peran Akbar Tandjung mampu menyelamatkan Partai Golkar dari ancaman Dekrit Presiden dan mengantarkan partai Golkar sampai pada masa ke emasan.

Kata kunci: Komunikasi Politik, Partai Golkar, Akbar Tandjung

